

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAD DI 34 PROVINSI INDONESIA DENGAN *MULTILEVEL MIXED- EFFECT MODEL*

Virgiana Nugransih Siwi¹

Lia Muntafiah²

Lidia Cahya Wuriati³

virgiana.siwi@uksw.edu

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

Abstract,

Local Own-source Revenue (PAD) optimization is the way how Local Government manages their regional finances as a form of implementing regional autonomy. Therefore, by understanding potential sectors to optimize their PAD, the Local Government will not depend on the Central Government funding, and they can improve their economy. Hence, this study aims to find the determinants of PAD in 34 provinces of Indonesia.

This study used multilevel mixed-effect model by using panel data which is the combination of time series data (2015 – 2020) and cross section data (34 provinces).

This study found that Labor Force, Government Spending, Domestic and Foreign Investment, Inflation, and RGDP (Regional Gross Domestic Product) simultaneously affect the PAD. The Labor Force, the Government Spending and RGDP partially had a positive effect on PAD, while the Domestic Investment, the Foreign Investment and Inflation partially did not affect PAD. This study also found that the Labor Force, the Government Spending, and the Inflation had different random effect in every province, while RGDP as the random effect parameter had same random effect in every province.

Key words: Local Own-source Revenue (PAD), Labor Force, Government Spending, Inflation, Regional GDP

Abstrak,

Pengoptimalan penerimaan PAD merupakan cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sebagai bentuk otonomi daerah. Melalui pemahaman sektor potensial yang dimiliki, pemerintah daerah semakin berpotensi untuk tidak bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan dapat meningkatkan perekonomian daerahnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi PAD di 34 provinsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan multilevel mixed-effect model, dengan data panel yaitu time series tahun 2015-2020 dan cross section 34 provinsi di Indonesia.

Hasil penelitian ini adalah Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, PMDN, PMA, Inflasi dan PDRB secara simultan mempengaruhi PAD. Secara parsial, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, dan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD. Sedangkan PMDN, PMA dan Inflasi terbukti tidak mempengaruhi PAD. Penelitian ini juga menemukan bahwa Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, dan Inflasi memiliki efek acak yang berbeda-beda di tiap provinsi, sedangkan PDRB memiliki efek acak yang sama di setiap provinsi.

Kata kunci: PAD, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, PMDN, PMA, Inflasi, PDRB.

LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari penerimaan daerah merupakan bentuk terlaksananya desentralisasi atau otonomi daerah. Pelaksanaan desentralisasi yang dimaksud adalah daerah mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri, yaitu memahami pengoptimalan potensi di daerahnya untuk pendanaan pelaksanaan otonomi daerah (UU No. 32 Tahun 2004) yang terlihat dalam komponen APBD tiap daerah (Ismail, 2021). Pengoptimalan di sini bukan sebatas besaran pajak atau retribusi yang ditetapkan pemerintah, tetapi bagaimana sektor yang berpotensi dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Pengoptimalan PAD di setiap daerah sudah menjadi tujuan setiap

pemerintah daerah, seperti melalui inovasi dan pemaksimalan potensi sektor yang dimiliki. Inovasi dapat berupa penerapan teknologi digital (Mubarok, 2021) dan pengoptimalan BUMD (Cahaya & Priyanto, 2021), namun pengoptimalan potensi yang sudah dimiliki juga menjadi penting dalam rangka efektifitas kebijakan mengenai pengoptimalan sumber-sumber PAD (Suryawan, 2021). Pengoptimalan sektor potensial terhadap PAD dapat dilihat dari pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) (Batik, 2013; Iman, Amalia, & Haviz, 2017; Muslim, Mallongi, & Rahman, 2019; Pamungkas, 2013; Perwira, 2018; Weley, Kumenaung, & Sumual, 2017), jumlah tenaga kerja (Kurniawan, Militina, & Suharto, 2018; Rosmalia, Iskandar, & Fitriadi,

2014) dan investasi seperti PMDN serta PMA (Batik, 2013; Lubis & Fitriani, 2018; Pamungkas, 2013) terhadap PAD. Di sisi lain, peran pemerintah pun juga dapat menjadi alat untuk memicu peningkatan PAD, seperti pengeluaran pemerintah (Asdar & Naidah, 2020; Kurniawan et al., 2018). Namun, faktor selain potensi daerah dan peran pemerintah juga perlu diperhatikan, seperti tingkat inflasi. Tingkat inflasi dapat dianggap sebagai faktor eksternal yang juga mempengaruhi PAD PAD (Batik, 2013; Muslim et al., 2019; Oktiani, 2021; Weley et al., 2017).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh PDRB, Jumlah Tenaga Kerja, Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi terhadap PAD secara parsial dan simultan? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui pengaruh PDRB, Jumlah Tenaga Kerja, Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi terhadap PAD secara parsial dan simultan. Kedua, mengetahui efek acak tiap variabel di tiap provinsi.

Perbedaan penelitian adalah penggunaan data panel dengan kombinasi data *cross section* 34 provinsi di Indonesia dan data time series tahun 2015 – 2020. Kedua, teknik analisis *Hirearchical Regression Method* atau *Multilevel Regression Method* yang dapat mengukur variasi konstanta dan variasi koefisien regresi dari variabel bebas di tiap provinsi. Hal ini berbeda dengan hasil regresi *Fixed Effect Model* maupun *Random Effect Model* yang hanya menampilkan *fixed coefficient regression*.

PAD

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 32 Tahun 2004).

Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan setiap individu berusia 15 tahun keatas yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa dan memperoleh bantuan pendapatan atau keuntungan (BPS, 2021a).

Investasi

Investasi jika dilihat dari sisi pengeluaran agregat adalah pembelian akan barang dan jasa sebagai barang modal oleh perusahaan dengan ekspektasi untuk mendapatkan pengembalian (*return*) (Mankiw, 2020). Di sisi lain, investasi dapat dilihat sebagai bentuk penanaman modal untuk proses atau peningkatan produksi di suatu perekonomian. Di Indonesia, investasi dalam bentuk penanaman modal terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), penanam modal berasal dari dalam negeri, kemudian (PMA) penanam modal berasal dari luar negeri atau kombinasi antara penanam modal dalam negeri dan luar negeri (UU No. 25 Tahun 2007).

Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus (BPS, 2021b). Inflasi dapat dihitung dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) (Mankiw, 2020), yaitu

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{(IHK_{t-1})} \times 100 \quad [1]$$

di mana t = tahun

Terciptanya inflasi dapat dijelaskan dengan teori kuantitas uang $MV = PT$ (Mankiw, 2020). Peningkatan jumlah uang beredar (M) dengan asumsi kecepatan perputaran uang (V) dan transaksi (T) konstan, akan menyebabkan peningkatan harga (P) atau inflasi.

Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai pasar akan barang dan jasa akhir yang diproduksi disuatu negara pada periode waktu tertentu (Mankiw, 2020). Jika dari level provinsi, maka yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pendekatan perhitungan PDRB terdiri dari 2, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Jika dari sisi pengeluaran, selain dihitung dari pengeluaran-pengeluaran sektor riil, PDRB dapat dihitung berdasarkan pengeluaran dari sektor ekonomi atau lapangan usaha (BPS, 2021c).

Perhitungan PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB menunjukkan bahwa perhitungan PDRB menggunakan harga periode

tersebut, sehingga perubahan PDRB ADHB bersumber dari perubahan output dan harga barang dan jasa. Sedangkan PDRB ADHK dihitung dengan tahun dasar, sehingga perubahan PDRB setelah tahun dasar menunjukkan perubahan output saja.

Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap PAD

Peran tenaga kerja dapat dilihat dari produksi ketika tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan output (barang dan jasa). Kedua ketika tenaga kerja mendapatkan pendapatan yang nantinya untuk membeli barang dan jasa. Semakin produktif tenaga kerja, maka semakin meningkat produksi perusahaan dan tingkat konsumsi tenaga kerja tersebut akibat peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, jika terdapat potensi sumber penerimaan PAD dalam proses produksi dan konsumsi tersebut, maka peningkatan produksi dan konsumsi dari tenaga kerja dapat berkontribusi pada PAD. Tenaga kerja dianggap sebagai sumber daya potensial untuk pembangunan daerah dan peningkatan PAD.

H1: Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PAD

Pengaruh Investasi Terhadap PAD

Peran penanaman modal perekonomian negara/provinsi adalah terciptanya iklim investasi yang mendukung peningkatan produksi tiap sektor ekonomi atau industri. Sebagai contoh peningkatan produksi di sektor pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 (Huda, 2021) atau industri Mesin dan Elektronik, Industri Makanan, Industri Karet dan Plastik di Batam tahun 2021 (Utami, 2021). Ketika dalam proses peningkatan produksi tersebut terdapat obyek dari komponen penerimaan PAD, maka PAD berpotensi untuk dapat meningkat. Sebagai contoh penerimaan dari retribusi ijin mendirikan bangunan dan retribusi reklame. Hal ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap PAD (Lubis & Fitriani, 2018; Pamungkas, 2013).

H2: PMDN berpengaruh positif terhadap PAD;

H3: PMA berpengaruh positif terhadap PAD

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PAD

Pengeluaran Pemerintah adalah pengeluaran akan barang dan jasa oleh pemerintah (Mankiw, 2020). Salah satu peran pengeluaran pemerintah adalah sebagai alat kebijakan fiskal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan PAD. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah daerah terlihat dari APBD, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya. Kaitannya dengan PAD adalah peran belanja modal untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan publik bagi masyarakat yang meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Sebagai contoh penyediaan infrastruktur jalan yang memudahkan distribusi barang dalam provinsi maupun antar provinsi. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh positif terhadap PAD (Asdar & Naidah, 2020).

H4: Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap PAD

Pengaruh Inflasi Terhadap PAD

Bartambahnya tingkat inflasi dapat menurunkan daya beli atau konsumsi masyarakat karena turunnya pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada penurunan penerimaan komponen PAD yang bergantung pada konsumsi masyarakat (Batik, 2013). Sebaliknya, jika tingkat inflasi menurun, maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat. Selanjutnya, daya beli masyarakat meningkat dan PAD akan meningkat pula. Berbeda dengan temuan Weley, Kumenaung, & Sumual (2019) bahwa peningkatan harga barang dan jasa memberikan kontribusi positif pada besaran penerimaan PAD,.

H5: Inflasi berpengaruh negatif terhadap PAD

Pengaruh PDRB Terhadap PAD

Perubahan PDRB ADHK berdasarkan lapangan usaha menunjukkan perubahan output atau pengeluaran dari setiap sektor lapangan usaha. Artinya, komponen penerimaan PAD yang bersumber dari setiap sektor ekonomi akan meningkat, ketika output atau pengeluaran dari sektor lapangan

usaha tersebut meningkat (Batik, 2013).

H6: PDRB berpengaruh positif terhadap PAD

METODE

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data panel, yaitu perpaduan antara data *time series* dari tahun 2015 – 2020 dan data *cross section* dari 34 provinsi di Indonesia. PAD adalah variabel terikat, sedangkan variabel-variabel bebasnya adalah Tenaga Kerja, PMDN, PMA, Pengeluaran Pemerintah, inflasi, dan PDRB. Seluruh data diambil dari BPS (2016, 2017, 2018, 2019, 2021).

Indikator empiris untuk setiap variabel adalah PAD: Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi (ln); TK: Tenaga Kerja (ln); PMDN: Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (triliun Rp); PMA: Realisasi Investasi Luar Negeri Menurut Provinsi (ln); GOV: Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi (ln); INFLASI: Presentasi perubahan IHK (persen); dan PDRB: Produk Domestik

Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi (ln). Variabel PMDN tidak ditransformasi ke logaritma natural (ln) karena terdapat nilai nol dalam data yang tidak bisa diubah ke dalam ln. Penelitian ini menggunakan metode regresi untuk data panel dengan alat analisis *Hierarchical Linear Model* atau *Multilevel Mixed-Effect Model*.

Nilai *random effect* diestimasi menggunakan model *regresi mixed effect*. Pemilihan variabel bebas seabagai parameter efek acak, dilakukan kombinasi variabel bebas yang bervariasi dari sisi waktu (*time variant*) dan dapat menampilkan hasil *robust standard error* dan *confidence interval* (95 persen). Selanjutnya kombinasi variabel bebas dipilih berdasarkan nilai Log pseudolikelihood paling tinggi.

$$\ln PAD_i = \beta_{0,i} + \beta_{1,i} \ln TK + \beta_{2,i} PMDN + \beta_{3,i} \ln PMA + \beta_{4,i} \ln GOV + \beta_{5,i} \ln Inflasi + \beta_{6,i} \ln PDRB + \epsilon_i$$

[1]

dimana *ln* adalah logaritma natural, $\beta_{0,i}$ adalah penjumlahan dari konstanta provinsi *i* (*i* = 1, 2, ..., 34) dan variasi konstanta provinsi *i* ($\beta_0 +$

$u_{0,i}$). Selanjutnya, $\beta_{z,i}$ adalah penjumlahan *fixed regression* variabel bebas z ($z = 1, 2, \dots, 6$) dan variasi koefisien regresi variabel bebas z provinsi i ($\beta_z + u_{z,i}$), sedangkan e adalah komponen error.

Regresi untuk *multilevel mixed-effect* menggunakan *robust standard error* sehingga asumsi homokedastisitas telah terpenuhi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Stasioneritas

Pada Tabel 1, seluruh variabel dalam model terbukti stasioner menggunakan uji stasioner Levin, Lin, dan Chu (LLC) (Alejo, Montes-Rojas, Galvao, & Sosa-Escudero, 2015).

Tabel 1 Hasil Tes Stasioner LLC

	<i>Adjusted t*</i>	<i>p-value</i>
lnPAD	-11.9669	0.0000***
lnTK	-71.9806	0.0000***
PMDN	- 6.7195	0.0000***
lnPMA	- 6.4755	0.0000***
lnGOV	-59.4828	0.0000***
INFLASI	-16.2173	0.0000***
lnPDRB	-18.0773	0.0000***

Catatan: *** tingkat signifikansi 1 persen.

Sumber: data yang diolah (2021)

Hasil Uji Multikolinearitas

Selanjutnya, model dalam penelitian ini terbukti tidak terdapat

multikolinearitas karena nilai korelasi antar variabel bebas pada Tabel 2 yang kurang dari 0.9.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	lnTK	PMDN	lnPMA	lnGOV	Inflasi	lnPDRB
lnTK	1.0000					
PMDN	0.7172	1.0000				
lnPMA	0.5019	0.6072	1.0000			
lnGOV	0.7998	0.7633	0.5515	1.0000		
INFLASI	0.1251	0.0261	-0.2014	0.0131	1.0000	
lnPDRB	0.8795	0.7973	0.5945	0.8897	0.0947	1.0000

Sumber: data yang diolah (2021)

Hasil Uji Normalitas Untuk Data Panel

Pada Tabel 3, error secara keseluruhan terbukti berdistribusi

normal yang dapat dilihat dari nilai dari Prob > chi2 pada e sebesar 0.0527, lebih besar dari tingkat signifikansi 1 persen.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Untuk Data Panel

	Observed Coef.	Bootstrap Std. Err.	z	P>z	Normal based [95 persen Conf. Interval]	
Skewness_e	0.0021468	0.002127	1.01	0.313	-0.002022	0.0063157
Kurtosis_e	0.0036532	0.0016558	2.21	0.027	0.0004079	0.0068986
Skewness_u	-0.0001074	1.14E-07	-942.22	0.0000	-0.0001076	-0.0001072
Kurtosis_u	-7.60E-07	2.01E-09	-377.34	0.0000	-7.64E-07	-7.56E-07
Joint test for Normality on e:			chi2(2) =	5.89	Prob > chi2 = 0.0527	
Joint test for Normality on u:			chi2(2) =	1.00E+06	Prob > chi2 = 0.0000	

Sumber: data yang diolah (2021)

Tabel 4. Hasil Regresi Mixed-Effect

Dependent Variable: LnPAD					
Independent Variable	Coefficient	Robust St. Error	Z	p-value	
lnTK	0.43270	0.12298	3.52	0.000	***
PMDN	-0.00004	0.00080	-0.06	0.955	
lnPMA	0.00125	0.00564	0.22	0.824	
lnGOV	0.54199	0.09032	6.00	0.000	***
INFLASI	-0.00628	0.00698	-0.90	0.368	
lnPDRB	0.26956	0.13781	1.96	0.050	*
Constant	-0.74190	0.17120	-4.33	0.000	***
Random-Effect Parameter	Estimate	Robust St. Error	95 persen Confidence Interval		
sd(lnTK)	1.14E-08	5.63E-07	1.01.E-50	1.28E+34	
sd(lnGOV)	0.0974	0.0432	0.0408	0.2323	
sd(INFLASI)	0.0184	0.0035	0.0127	0.0267	
sd(lnPDRB)	0.1095	0.2091	0.0023	4.6165	
sd(Constant)	0.2157	0.0800	0.1043	0.4461	
sd(Residual)	0.1027	0.0276	0.0606	0.1740	
R ² Bryk/Raudenbush	Level 1	0.6271	Wald chi2(6)	743.66	
	Level 2	0.9292	P-value	0.000 ***	

Catatan: ***, * tingkat signifikansi 1 persen dan 10 persen berturut-turut

Sumber: data yang diolah (2021)

Tabel 4 menunjukkan hasil regresi *multilevel mixed-effect* dengan lnTK, PMDN, lnPMA, INFLASI, dan lnPDRB sebagai parameter efek acak. Terbukti bahwa

seluruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi PAD pada tingkat signifikansi 1 persen, di mana p-value dari Wald-chi2 sebesar 0.000. Kemudian, berdasarkan nilai

R^2 untuk data panel, yang menggunakan R^2 Bryk/Raudenbush (Moehring & Schmidt, 2013), nilai R^2 level 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dalam kelompok provinsi (*within province groups*) dapat menjelaskan PAD sebesar 92.92 persen. Sedangkan nilai R^2 level 1 menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas secara keseluruhan (*overall*) dapat menjelaskan PAD sebesar 62.71 persen, sisanya dijelaskan oleh variabel bebas lain diluar model.

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4, tenaga kerja terbukti secara signifikan mempengaruhi PAD pada tingkat signifikansi 1 persen. Nilai koefisien, 0.43, menunjukkan bahwa pengaruh tenaga kerja terhadap PAD bersifat inelastis, di mana setiap peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1 persen akan meningkatkan PAD sebesar 0.43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja berpotensi untuk meningkatkan PAD pada sektor-sektor yang berpotensi sebagai sumber PAD di provinsi di Indonesia. Penemuan ini sejalan dengan Rosmalia et al., (2014),

Kurniawan et al., (2018) yang menemukan pengaruh positif tenaga kerja terhadap PAD. Berbeda dengan Rosmalia et al., (2014) yang menemukan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Jika melihat hasil efek acak tenaga kerja di Tabel 5, terlihat bahwa kontribusi tenaga kerja terhadap PAD tergantung pada rata-rata jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Maluku Utara memiliki efek acak paling tinggi dibandingkan 34 provinsi yang lain, namun besaran kontribusinya menempati urutan rendah, yaitu 33. Berbeda dengan provinsi di pulau Jawa yang menempati urutan 6 besar untuk kontribusi karena memiliki rata-rata jumlah tenaga kerja lebih banyak, meskipun memiliki efek acak yang lebih kecil. Oleh karena itu, peningkatan jumlah tenaga kerja dan produktivitas kerja menjadi penting untuk dipertimbangkan pemerintah provinsi, terutama provinsi yang memiliki efek acak tinggi namun memiliki rata-rata jumlah tenaga kerja rendah. Penyediaan lapangan pekerjaan dan pengembangan

kualitas tenaga kerja sebagai penting untuk dilakukan. peningkatan produktivitas menjadi

Tabel 5. Hasil Efek Acak, Rata-rata dan Total Kontribusi Tenaga Kerja

Rank	PROVINSI	EFEK	TENAGA KERJA		KONTRIBUSI		Rank	PROVINSI	EFEK	TENAGA KERJA		KONTRIBUSI	
			Mean ¹	rank	(juta orang) ²	rank				Mean ¹	rank	(juta orang) ²	rank
1	Maluku Utara	0.520	0.537	32	0.723	32	18	Nusa Tenggara Barat	0.428	2.413	15	1.459	15
2	Papua Barat	0.516	0.445	33	0.658	33	19	Kalimantan Tengah	0.428	1.342	23	1.134	23
3	DKI Jakarta	0.508	5.181	6	2.307	4	20	Sumatera Selatan	0.418	4.182	8	1.820	7
4	Kalimantan Timur	0.481	1.753	20	1.310	19	21	Sumatera Barat	0.418	2.574	11	1.484	14
5	Sulawesi Barat	0.475	0.646	30	0.813	30	22	Aceh	0.417	2.348	16	1.428	16
6	Kalimantan Utara	0.468	0.325	34	0.591	34	23	Bangka Belitung	0.415	0.716	29	0.870	29
7	Bali	0.466	2.496	12	1.531	11	24	DI Yogyakarta	0.413	2.131	17	1.367	18
8	Sulawesi Tenggara	0.465	1.250	24	1.109	24	25	Sulawesi Utara	0.412	1.169	25	1.066	25
9	Banten	0.459	5.765	5	2.233	5	26	Lampung	0.410	4.203	7	1.803	8
10	Kalimantan Selatan	0.456	2.129	18	1.412	17	27	Sumatera Utara	0.406	6.955	4	2.198	6
11	Nusa Tenggara Timu	0.453	2.490	13	1.512	12	28	Sulawesi Selatan	0.403	3.989	9	1.747	9
12	Kalimantan Barat	0.441	2.472	14	1.490	13	29	Jawa Tengah	0.402	18.035	3	3.201	3
13	Gorontalo	0.440	0.573	31	0.783	31	30	Bengkulu	0.402	1.009	26	1.004	26
14	Kepulauan Riau	0.437	0.988	27	0.995	27	31	Jawa Barat	0.397	22.504	1	3.447	1
15	Maluku	0.434	0.748	28	0.882	28	32	Jawa Timur	0.393	21.096	2	3.316	2
16	Jambi	0.433	1.737	21	1.270	20	33	Sulawesi Tengah	0.354	1.496	22	1.153	22
17	Riau	0.429	3.066	10	1.617	10	34	Papua	0.312	1.785	19	1.198	21

Catatan: ¹dihitung berdasarkan data dari BPS tahun 2015-2020. ²LnTK adalah hasil kali dari efek dan ln (rata-rata Tenaga Kerja), kemudian kontribusi dihitung dengan $e^{\ln TK}$.

Sumber: data yang diolah (2021)

Selanjutnya, PMDN dan PMA, sebagai perwakilan dari investasi, secara parsial tidak mempengaruhi PAD. Hal ini dimungkinkan karena proses transisi perubahan kebijakan dan penyerapan investasi di sektor potensi masih rendah. Salah satu kebijakan terkait PMDN dan PMA adalah penerapan perijinan di sistem *online single submission* pada tahun 2017. Terjadinya proses transisi dari kebijakan tersebut memberi dampak tren perlambatan investasi tahun 2018 (Akbar, 2019). Selain itu, meskipun nantinya perkembangan teknologi memberi efisiensi proses

realisasi investasi tahun selanjutnya dan diharapkan meningkatkan realisasi investasi, tetapi jika penyerapan investasi tidak pada sektor yang berpotensi, maka investasi tersebut akan kurang berperan dalam peningkatan PAD. Sebagai contoh penyerapan investasi di sektor tersier atau jasa yang kurang menyerap tenaga kerja atau meningkatkan aktivitas ekonomi dibandingkan industri manufaktur di DKI Jakarta pada tahun 2020 (Santoso, 2020).

Hasil penelmaan ini sejalan dengan penemuan Pamungkas (2013). Berbeda dengan Kurniawan

et al., (2018) dan Lubis & Fitriani, (2018) menemukan pengaruh PMA, PMDN, Investasi swasta terhadap PAD.

Sedangkan pada variabel Pengeluaran Pemerintah pada tabel 4, setiap peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 persen, secara signifikan dapat meningkatkan PAD sebesar 0.54 persen pada tingkat signifikansi 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran

pemerintah telah memberikan fasilitas dan pelayanan publik yang dapat meningkatkan roda perekonomian daerahnya. Komponen PAD yang terdampak dari pengeluaran pemerintah tersebut dapat meningkat, sesuai dengan temuan Iman, Amalia, & Haviz, (2017) dan Kurniawan et al., (2018). Berbeda dengan Muslim, Mallongi, & Rahman, (2019).

Tabel 6. Efek Acak, Rata-rata dan Total Kontribusi Pengeluaran Pemerintah

Rank	PROVINSI	EFEK	GOV		KONTRIBUSI		Rank	PROVINSI	EFEK	GOV		KONTRIBUSI	
			Mean ¹	rank	(Triliun Rupiah) ²	rank				Mean ¹	rank	(Triliun Rupiah) ²	rank
1	Gorontalo	0.555	1.762	34	1.369	34	18	Kalimantan Tengah	0.544	4.590	22	2.291	22
2	Sulawesi Utara	0.554	3.785	26	2.090	25	19	Sulawesi Tengah	0.542	3.878	25	2.083	26
3	Sulawesi Selatan	0.553	8.551	12	3.275	11	20	DKI Jakarta	0.541	71.175	1	10.028	1
4	Maluku	0.552	2.931	29	1.811	28	21	Sulawesi Tenggara	0.540	4.129	24	2.150	24
5	Kalimantan Timur	0.551	10.070	9	3.566	9	22	Sumatera Selatan	0.540	8.450	13	3.163	13
6	Sulawesi Barat	0.549	1.893	33	1.420	33	23	Kalimantan Barat	0.539	5.514	18	2.510	18
7	Kepulauan Riau	0.549	3.422	27	1.964	27	24	Jawa Barat	0.538	36.199	2	6.891	2
8	Bali	0.548	6.615	15	2.818	15	25	Bengkulu	0.538	3.002	28	1.806	29
9	Lampung	0.547	6.653	14	2.820	14	26	Jawa Tengah	0.538	24.291	4	5.560	4
10	Sumatera Utara	0.547	12.444	7	3.969	6	27	Maluku Utara	0.538	2.486	32	1.631	31
11	DI Yogyakarta	0.546	5.350	19	2.500	19	28	Kalimantan Utara	0.537	2.750	30	1.721	30
12	Sumatera Barat	0.545	6.118	17	2.684	17	29	Nusa Tenggara Tin	0.536	5.014	20	2.375	20
13	Jawa Timur	0.545	31.998	3	6.600	3	30	Banten	0.536	10.984	8	3.612	8
14	Jambi	0.544	4.488	23	2.264	23	31	Papua Barat	0.536	8.749	11	3.197	12
15	Nusa Tenggara Barat	0.544	4.830	21	2.356	21	32	Riau	0.534	9.335	10	3.297	10
16	Kalimantan Selatan	0.544	6.467	16	2.761	16	33	Bangka Belitung	0.526	2.520	31	1.626	32
17	Aceh	0.544	14.987	5	4.362	5	34	Papua	0.511	14.442	6	3.909	7

Catatan: ¹dihitung berdasarkan data dari BPS tahun 2015-2020. ²LnGOV adalah hasil kali dari efek dan ln (rata-rata Pengeluaran Pemerintah), kemudian kontribusi dihitung dengan $e^{\ln GOV}$.

Sumber: data yang diolah (2021)

Namun demikian, penggunaan pengeluaran pemerintah terhadap PAD harus fokus pada sektor yang produktif, bukan konsumtif seperti belanja pegawai. Rasio belanja modal di provinsi harus lebih dominan dibandingkan

rasio belanja pegawai atau belanja barang dan jasa yang konsumtif. Selanjutnya, *transfer payment* yang diberikan pemerintah (seperti subsidi) dapat lebih fokus pada produktivitas masyarakat dan di sektor yang produktif. Hal ini

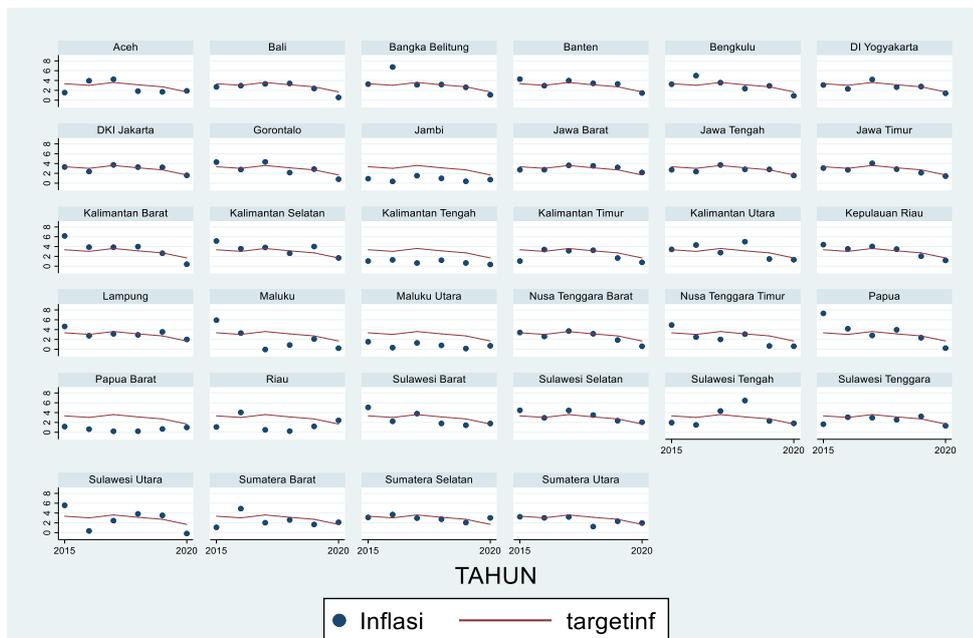
bertujuan tidak terciptanya *economic bubble* akibat besarnya pengeluaran pemerintah untuk konsumsi/ sektor konsumtif.

Jika melihat hasil efek acak pada Tabel 6, total kontribusi efek pengeluaran pemerintah tergantung dari rata-rata pengeluaran pemerintah daerah provinsi. Gorontalo memiliki koefisien efek acak paling tinggi, namun nilai total kontribusi efek pengeluaran pemerintahnya paling rendah dibanding 33 provinsi lainnya.

Inflasi

Berdasarkan Tabel 4, inflasi terbukti tidak mempengaruhi PAD

pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini dapat dimungkinkan oleh efektifitas kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi seperti yang diperlihatkan dari Gambar 1. Tren tingkat inflasi aktual di setiap provinsi relatif sama atau semakin kurang dari target inflasi. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat semakin meningkat, sehingga daya beli masyarakat akan barang dan jasa yang menjadi komponen penerimaan PAD tidak terlalu berubah.



Gambar 1 Tingkat Inflasi Aktual 34 Provinsi dan Target Inflasi Nasional

Catatan: Inflasi: tingkat inflasi aktual, targetinf: Target Inflasi (Bank Indonesia, 2021).

Sumber: data yang diolah (2021)

Oktiani (2021) menambahkan bahwa pajak yang bersifat memaksa, membuat masyarakat tetap membayar komponen pajak meskipun terdapat perubahan harga

akan barang dan jasa, serupa dengan penelitian Batik (2013).

Hasil efek acak pada Tabel 7 menunjukkan bahwa koefisien efek beragam, yaitu positif dan negatif.

Tabel 7. Efek Acak, Rata-rata dan Total Kontribusi Inflasi

Rank	PROVINSI	EFEK	INFLASI		KONTRIBUSI		Rank	PROVINSI	EFEK	INFLASI		KONTRIBUSI	
			Mean ¹	rank	% ²	rank				Mean ¹	rank	% ²	rank
1	Kalimantan Selatan	0.112	3.475	2	0.390	1	18	Kepulauan Riau	-0.011	3.105	8	-0.035	18
2	Bali	0.096	2.545	22	0.246	3	19	Sumatera Selatan	-0.020	2.925	13	-0.059	19
3	DKI Jakarta	0.096	2.913	14	0.279	2	20	Maluku	-0.030	2.048	29	-0.062	21
4	Kalimantan Timur	0.089	2.212	28	0.196	5	21	Sulawesi Selatan	-0.031	3.292	5	-0.101	25
5	Maluku Utara	0.065	0.795	33	0.052	10	22	Sumatera Barat	-0.032	2.393	26	-0.076	22
6	Bangka Belitung	0.061	3.338	4	0.203	4	23	Jawa Barat	-0.033	3.007	11	-0.100	24
7	Kalimantan Utara	0.048	3.048	10	0.147	6	24	Jawa Tengah	-0.037	2.665	19	-0.099	23
8	Banten	0.035	3.230	6	0.114	7	25	Riau	-0.039	1.577	30	-0.062	20
9	Kalimantan Tengah	0.033	0.868	31	0.028	11	26	Lampung	-0.043	3.165	7	-0.137	28
10	Bengkulu	0.032	2.993	12	0.096	8	27	Nusa Tenggara Timur	-0.049	2.292	27	-0.111	27
11	Kalimantan Barat	0.027	3.492	1	0.096	9	28	Jawa Timur	-0.056	2.710	17	-0.151	29
12	DI Yogyakarta	0.009	2.735	16	0.024	12	29	Sulawesi Barat	-0.061	2.683	18	-0.164	30
13	Gorontalo	0.007	2.873	15	0.020	13	30	Sumatera Utara	-0.070	2.497	24	-0.174	31
14	Sulawesi Utara	0.006	2.587	20	0.015	14	31	Sulawesi Tengah	-0.077	3.058	9	-0.236	33
15	Jambi	0.002	0.812	32	0.002	15	32	Aceh	-0.078	2.525	23	-0.196	32
16	Nusa Tenggara Barat	-0.002	2.558	21	-0.005	16	33	Papua	-0.096	3.468	3	-0.334	34
17	Sulawesi Tenggara	-0.006	2.463	25	-0.016	17	34	Papua Barat	-0.161	0.643	34	-0.103	26

Catatan: ¹dihitung berdasarkan data dari BPS tahun 2015-2020. ²kontribusi dihitung dari hasil kali efek dan rata-rata Inflasi.

Sumber: data yang diolah (2021)

Kemudian, hasil Tabel 4 menunjukkan bahwa PDRB mempengaruhi PAD secara positif pada tingkat signifikansi 10 persen dan inelastis. Setiap peningkatan PDRB sebesar 1 persen akan meningkatkan PAD sebesar 0.27 persen. Selanjutnya, efek acak PDRB pada Tabel 8 di setiap provinsi memiliki nilai yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PDRB pada PAD sangat tergantung pada besaran PDRB di masing-masing provinsi.

Pengembangan sektor lapangan usaha potensial yang

berkelanjutan dapat berpotensi untuk meningkatkan penerimaan PAD. Sebagai contoh realisasi penerimaan PAD dari sektor industri pengolahan di Jawa Tengah yang terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2020, meskipun total realisasi penerimaan PAD berdasarkan lapangan usaha di Jawa Tengah menurun pada tahun 2020. Kontribusi sektor industri pengolahan telah mencapai Rp 16 triliun atau setara dengan 43 persen dari total realisasi penerimaan PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Iman et al., (2017) dan

Perwira (2018). Iman et al., (2017) menyatakan bahwa perilaku konsumtif masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai pendorong produksi sektor industri tersebut,

karena meningkatnya permintaan dari masyarakat. Berbeda dengan penemuan Muslim et al., (2019) yang menemukan PDRB berpengaruh negatif terhadap PAD.

Tabel 8 Efek Acak, Rata-rata dan Total Kontribusi PDRB

Rank	PROVINSI	EFEK	PDRB		KONTRIBUSI		Rank	PROVINSI	EFEK	PDRB		KONTRIBUSI	
			Mean ¹	rank	(Triliun Rupiah) ²	rank				Mean ¹	rank	(Triliun Rupiah) ²	rank
1	Aceh	0.270	1.235	18	1.058	18	18	Nusa Tenggara Barat	0.270	0.927	22	0.980	22
2	Sumatera Utara	0.270	4.964	5	1.540	5	19	Nusa Tenggara Timur	0.270	0.639	26	0.886	26
3	Sumatera Barat	0.270	1.584	13	1.132	13	20	Kalimantan Barat	0.270	1.262	17	1.065	17
4	Riau	0.270	4.744	6	1.521	6	21	Kalimantan Tengah	0.270	0.910	23	0.975	23
5	Jambi	0.270	1.388	16	1.092	16	22	Kalimantan Selatan	0.270	1.234	19	1.058	19
6	Sumatera Selatan	0.270	2.886	10	1.331	10	23	Kalimantan Timur	0.270	4.594	7	1.508	7
7	Bengkulu	0.270	0.428	30	0.796	30	24	Kalimantan Utara	0.270	0.558	28	0.854	28
8	Lampung	0.270	2.245	11	1.244	11	25	Sulawesi Utara	0.270	0.810	25	0.945	25
9	Bangka Belitung	0.270	0.504	29	0.832	29	26	Sulawesi Tengah	0.270	1.085	20	1.022	20
10	Kepulauan Riau	0.270	1.691	12	1.152	12	27	Sulawesi Selatan	0.270	2.961	9	1.340	9
11	DKI Jakarta	0.270	16.657	1	2.134	1	28	Sulawesi Tenggara	0.270	0.849	24	0.957	24
12	Jawa Barat	0.270	13.655	3	2.023	3	29	Gorontalo	0.270	0.257	33	0.693	33
13	Jawa Tengah	0.270	9.080	4	1.812	4	30	Sulawesi Barat	0.270	0.298	31	0.722	31
14	DI Yogyakarta	0.270	0.946	21	0.985	21	31	Mahuku	0.270	0.284	32	0.712	32
15	Jawa Timur	0.270	15.071	2	2.078	2	32	Mahuku Utara	0.270	0.241	34	0.681	34
16	Banten	0.270	4.164	8	1.469	8	33	Papua Barat	0.270	0.580	27	0.864	27
17	Bali	0.270	1.459	14	1.107	14	34	Papua	0.270	1.422	15	1.100	15

Catatan: ¹dihitung berdasarkan data dari BPS tahun 2015-2020. ²LnPDRB adalah hasil kali dari efek dan ln (rata-rata PDRB), kemudian kontribusi dihitung dengan $e^{\ln PDRB}$.

Sumber: data yang diolah (2021)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tenaga Kerja, Investasi (PMA dan PMDN), Pengeluaran Pemerintah, Inflasi dan PDRB dapat menjelaskan PAD di setiap provinsi sebesar 92 persen dan secara keseluruhan mencapai 62.71 persen. Secara simultan, seluruh variabel bebas mempengaruhi PAD pada tingkat signifikansi 1 persen. Sedangkan, secara parsial, hanya investasi dan inflasi yang terbukti tidak mempengaruhi PAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki setiap provinsi dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan PAD, seperti tenaga kerja dan sektor ekonomi potensial yang terdapat pada komponen PDRB berdasarkan lapangan usaha. Oleh karena itu, pemerintah provinsi disarankan untuk menganalisis sektor apa di provinsi mereka yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

Kemudian, tenaga kerja memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sehingga, pemerintah provinsi perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja di provinsi mereka. Penyediaan lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor ekonomi yang lebih menyerap tenaga kerja.

Pada bagian hasil estimasi efek acak, besaran rata-rata setiap variabel menentukan besaran total kontribusi variabel terhadap PAD di setiap provinsi. Oleh karena itu, memiliki efek acak yang tinggi tetapi tidak diikuti dengan jumlah tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan PDRB yang tinggi, kontribusi ketiga variabel tersebut terhadap PAD provinsi tetaplah rendah.

Memahami sektor lapangan usaha yang berpotensi, bagaimana mengembangkannya secara berkelanjutan, dan sektor apa yang menyerap tenaga kerja menjadi poin kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PAD. Namun, pada bagian pengeluaran

pemerintah harus diarahkan pada sektor yang produktif, yaitu peningkatan dan lebih besarnya rasio belanja modal dibandingkan belanja pegawai atau barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, C. (2019). *BKPM Gagal Capai Target Realisasi Investasi 2018*. TEMPO. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1170354/bkpm-gagal-capai-target-realisasi-investasi-2018/full&view=ok>
- Alejo, J., Montes-Rojas, G., Galvao, A., & Sosa-Escudero, W. (2015). Tests for normality in linear panel-data models. *Stata Journal*, 15(3), 822–832. <https://doi.org/10.1177/1536867x1501500314>
- Asdar, & Naidah. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Balance*, 16(2), 185–209. <https://doi.org/10.26618/jeb.v16i2.4551>
- Bank Indonesia. (2021). *Target Inflasi*. Retrieved from Bank Indonesia website: <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/target-inflasi.aspx>

- Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jep.v11i1.3735>
- BPS. (2016). *Statistik Indonesia 2016* (03220.1610). Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2016/06/29/7aa1e8f93b4148234a9b4bc3/statistik-indonesia-2016.html>
- BPS. (2017). *Statistik Indonesia 2017* (03220.1709). Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2017/07/26/b598fa587f5112432533a656/statistik-indonesia-2017>
- BPS. (2018). *Statistik Indonesia 2018* (03220.1811). Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html>
- BPS. (2019). *Statistik Indonesia 2019* (03220.1911). Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2019/07/04/daac1ba18ca1e90706ee58a/statistik-indonesia-2019.html>
- BPS. (2021a). *Konsep/Penjelasan Teknis Tenaga Kerja*. Retrieved from [bps.go.id website:
https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html](https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html)
- BPS. (2021b). *Konsep Inflasi*. Retrieved from Badan Pusat Statistik website:
<https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>
- BPS. (2021c). *Produk Domestik Regional Bruto*. Retrieved from Badan Pusat Statistik website:
<https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab1>
- BPS. (2021d). *Statistik Indonesia 2021* (03200.2103). Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html>
- Cahya, & Priyanto. (2021). *Optimalkan BUMD dan Aset Guna Perkuat PAD Jateng*. Retrieved from DPRD Provinsi Jawa Tengah website:
<https://dprd.jatengprov.go.id/2021/10/20/optimalkan-bumd-dan-aset-guna-perkuat-pad-jateng/>
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th Edition). In J. Seaman (Ed.), Sage Publishing. London: SAGE Publication Ltd.

- Huda, N. (2021). *Jelang Akhir 2021, Sektor PMDM dan PMA Menggairahkan Iklim Investasi di Kalsel*. Banjarmasin Post. Retrieved from <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/10/26/jelang-akhir-2021-sektor-pmdm-dan-pma-menggairahkan-iklim-investasi-di-kalsel>
- Iman, I. N., Amalia, I., & Haviz, M. (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2000-2017*.
- Ismail. (2021). *APBD Turun Akibat PAD Tak Maksimal, Pemprov Kepri Target 4 Prioritas Pembangunan 2022*. Presmedia.Id. Retrieved from <https://presmedia.id/berita-39037/apbd-turun-akibat-pad-tak-maksimal-pemprov-kepri-target-4-prioritas-pembangunan-2022.html>
- Kurniawan, A. I., Militina, T., & Suharto, R. B. (2018). Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Fakultas Ekonomi Mulawarman*, 13(2), 82. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2453>
- Lubis, H., & Fitriani. (2018). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara Tahun 1987-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6, 114–131. <https://doi.org/10.24952/mas-harif.v6i2.1139>
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles Of Economics* (9th ed.). Cengage Learning, Inc.
- Moehring, K., & Schmidt, A. (2013). *MLT: Stata module to provide multilevel tools*. Retrieved from <https://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s457577.html>
- Mubarok, E. A. (2021). *Tingkatkan PAD, Bapenda Terus Berinovasi. Radar Bojonegoro*. Retrieved from <https://radarbojonegoro.jawapos.com/berita-daerah/bojonegoro/26/10/2021/tingkatkan-pad-bapenda-terus-berinovasi>
- Muslim, C., Mallongi, S., & Rahman, Z. (2019). Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi Universitas Muslim Indonesia*, 2(3), 57–65.
- Oktiani, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 16–35.

- Pamungkas, I. R. B. (2013). Analisis Pengaruh PMDN, PMA, dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati Tahun 1982-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/2484>
- Pemerintah Pusat. UU No. 32 tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. (2004).
- Pemerintah Pusat. UU No. 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal*. (2007).
- Perwira, R. (2018). Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan dan Jumlah Penduduk Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(2). Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/10090>
- Rosmalia, J., Iskandar, R., & Fitriadi. (2014). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 5(3). Retrieved from https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/jeko_bisnis.v5i2.2266
- Santoso, Y. I. (2020). *Sektor usaha perikanan paling tidak diminati investor*. Kontan. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/sektor-usaha-perikanan-paling-tidak-diminati-investor>
- Suryawan, O. (2021). *Naikan Target PAD, DPRD Minta Eksekutif Maksimalkan Potensi yang Belum Tergarap*. Balipuspa News. Retrieved from <https://www.balipuspanews.com/naikan-target-pad-dprd-minta-eksekutif-maksimalkan-potensi-yang-belum-tergarap.html>
- Utami, H. S. (2021, September 29). *Realisasi PMA 2020 di Batam Mencapai 643 Juta Dolar Amerika*. *Tribun Batam*. Retrieved from <https://batam.tribunnews.com/2021/09/29/realisasi-pma-2020-di-batam-mencapai-643-juta-dolar-amerika>
- Weley, I. R., Kumenaung, A. G., & Sumual, J. I. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(6). <https://doi.org/10.35794/jpekd.16457.19.3.2017>